

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah yang dihadapi negara-negara berkembang sering kali menemui hambatan tentang pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Analisis makroekonomi kerap menunjukkan gejala perlambatan atau stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu di seluruh dunia. Pandemi ini memberikan tekanan berat pada perekonomian global nasional, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berlangsung dibawah potensinya. Hal tersebut membuat tidak tercapainya tingkat lapangan pekerja penuh dan menjadi tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Indonesia termasuk Negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yang mana mempunyai 38 provinsi di berbagai daerah. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, kontribusi antar pulau ini cukup beragam. Dengan didasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa adalah penyokong utama ekonomi nasional, dengan memberikan kontribusi sebesar 57,27 persen terhadap PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2023, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5,18 persen. Sementara itu, Sumatera menyumbang 21,94 persen menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi antar wilayah di Indonesia.

Sumatera, pulau terbesar ketiga di Indonesia, kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi 10 provinsi, menjadikannya pulau dengan jumlah provinsi terbanyak di Indonesia. Pulau Sumatera dikenal dengan potensi sumber daya alamnya yang kaya, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil tambang. Sektor sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, untuk menciptakan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan sumber daya manusia yang menguasai keterampilan khusus, terutama disektor

sektor strategis. Hal ini mencakup pekerja yang terampil dalam teknologi, manajemen, serta keterampilan teknis lain yang relevan dengan industri modern.

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	132.070	131.581	135.274	140.972	146.932	137.365,8
Sumatera Utara	539.514	533.746	547.652	573.529	602.236	559.335,4
Sumatera Barat	172.514	169.427	175.000	182.629	191.071	178.128,2
Riau	495.607	489.996	506.472	529.533	551.828	514.687,2
Jambi	149.111	148.354	153.851	161.730	169.269	156.463,0
Sumatera Selatan	315.465	315.129	326.405	343.460	360.911	332.274,0
Bengkulu	46.345	46.338	47.854	49.916	52.041	48.498,8
Lampung	244.378	240.320	246.966	257.534	269.241	251.687,8
B.Belitung	53.942	52.706	55.370	57.805	60.338	56.032,2
Kep. Riau	181.878	174.959	180.952	190.164	200.044	185.599,4
Rata-rata	233.082,40	230.255,60	237.579,60	248.727,20	260.391,10	242.007,18

Sumber: BPS Tinjau Ekonomi Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia 2024

Berdasarkan data PDRB AHK untuk provinsi-provinsi di Pulau Sumatera antara tahun 2019 hingga 2023 dalam data table 1.1, Sumatera Utara mencatat rata-rata PDRB tertinggi di Pulau Sumatera sebesar Rp 559.335,4 miliar, menunjukkan dominasi provinsi ini sebagai pusat ekonomi kawasan dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang kuat. Di posisi selanjutnya, Riau menempati peringkat kedua dengan rata-rata Rp 514.687,2 miliar, didukung oleh sektor pertambangan dan energi. Sumatera Selatan juga menunjukkan kinerja ekonomi yang tinggi dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 332.274,0 miliar, sejalan dengan peran sektor industri pengolahan dan proyek-proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Sebaliknya, Bengkulu memiliki rata-rata PDRB terendah, yaitu hanya Rp 48.498,8 miliar, mencerminkan skala ekonomi yang kecil, ketergantungan pada sektor primer, serta keterbatasan infrastruktur dan investasi. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata PDRB seluruh provinsi di Pulau Sumatera cenderung meingkat setiap tahun, kecuali pada 2020 yang menurun akibat dampak pandemi. Data ini memperlihatkan bahwa besaran PDRB sangat

dipengaruhi oleh struktur ekonomi, sektor unggulan, serta kapasitas infrastruktur dan investasi di masing-masing provinsi.

Perkembangan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam menopang proses pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang optimal tetap menjadi prioritas utama pada perencanaan pembangunan, baik di skala nasional ataupun daerah. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menurut perubahan PDRB dengan harga konstan dalam suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Wibowo, 2014).

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan 2010 Provinsi Di Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23	3,00
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	3,30
Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	3,13
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	2,76
Jambi	4,35	-0,51	3,70	5,12	4,66	3,46
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08	3,89
Bengkulu	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26	3,35
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	3,04
Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,38	2,97
Kep. Riau	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,20	2,95
Sumatera	4,56	-1,26	3,39	4,63	4,62	3,19

Sumber: BPS Tinjau Ekonomi Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama periode 2019 hingga 2023 tercatat sebesar 3,19 persen. Tahun 2020 menjadi titik terendah dalam pertumbuhan tersebut, dengan penurunan tajam yang dipicu oleh merebaknya pandemi COVID-19 serta

sejumlah faktor lainnya. Namun demikian, setelah masa sulit tersebut, provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang cukup signifikan. Peningkatan ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi regional. Provinsi Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi sebesar 3,89 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 3,46 persen. Sementara itu, Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan ekonomi paling rendah dengan hanya 2,76 persen.

Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2, yang didefinisikan dengan tenaga kerja adalah “individu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan demi menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun masyarakat.” Secara umum, penduduk suatu negara diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Seseorang digolongkan sebagai tenaga kerja apabila berada dalam rentang usia produktif, yakni antara 15 hingga 64 tahun di Indonesia. Adapun angkatan kerja mencakup penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dalam kegiatan ekonomi (Benggolo, 2017).

Tabel 1.3 Data Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (jiwa)

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	2.219.698	2.359.905	2.361.300	2.394.994	2.447.345	2.356.648
Sumatera Utara	6.681.224	6.842.252	7.035.850	7.197.374	7.549.537	7.061.247
Sumatera Barat	2.460.554	2.581.524	2.581.444	2.688.164	2.844.925	2.631.322
Riau	2.996.079	3.022.988	3.148.947	3.168.929	3.002.334	3.067.855
Jambi	1.691.782	1.739.003	1.746.840	1.797.819	1.802.264	1.755.542
Sumatera Selatan	3.968.499	4.091.383	4.179.708	4.289.704	4.399.659	4.185.791
Bengkulu	981.095	1.031.881	1.021.775	1.037.496	1.069.615	1.028.372
Lampung	4.077.930	4.280.109	4.284.320	4.387.966	4.697.658	4.345.597
B.Belitung	715.927	699.881	701.441	730.972	749.815	719.607
Kep. Riau	935.682	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.043.011
Sumatera	2.672.847	2.766.553	2.814.904	2.884.942	2.958.251	2.819.499

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Rata-rata jumlah tenaga kerja di wilayah Sumatera pada tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya, sebagaimana ditampilkan pada data tabel 1.3, dengan rata-rata sebesar 2.819.499 jiwa. Provinsi Sumatera Utara tercatat memiliki persentase penduduk usia kerja tertinggi, yaitu sekitar 7.061.247 jiwa, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase terendah, hanya sekitar 719.607 jiwa. Rendahnya jumlah penduduk usia kerja di Bangka Belitung dipengaruhi oleh populasi yang relatif kecil dan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya timah, serta sektor perkebunan dan perikanan. Sektor-sektor ini cenderung membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah terbatas atau bersifat musiman, yang membawa dampak pada jumlah penduduk yang bekerja secara tetap.

Berdasarkan Teori Permintaan Tenaga Kerja Keynesian, tingkat pengangguran dan jumlah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan agregat. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat mendorong permintaan agregat melalui kenaikan konsumsi, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, setiap peningkatan jumlah tenaga kerja memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian, yang dapat meningkatkan pendapatan.

Perkembangan teori ekonomi kontemporer menekankan bahwa tenaga kerja tidak hanya ditinjau melalui kuantitasnya, namun juga dari kualitas atau keterampilannya. Sadono Sukirno (2016) menyatakan bahwa tenaga kerja dengan keterampilan tinggi mempunyai produktivitas yang lebih besar dan daya adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, tenaga kerja terampil dipandang sebagai aset strategis guna mendorong laju perekonomian yang berkelanjutan, berbeda dengan tenaga kerja tidak terampil yang umumnya hanya mampu beroperasi pada sektor informal atau padat karya dengan produktivitas rendah.

Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan masih adanya ketimpangan struktural dalam hal komposisi tenaga kerja. Data nasional dari Badan Pusat

Statistik (2021–2023) memperlihatkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih tergolong tidak terampil, yaitu mereka yang tidak memiliki pendidikan menengah atas atau pelatihan kerja formal. Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, karena dominasi tenaga kerja tidak terampil menyebabkan efisiensi dan daya saing industri menjadi rendah.

Tabel 1.4 Data Tenaga Kerja Terampil (berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pelatihan) dan Tenaga Kerja Tidak Terampil di Indonesia (Jiwa)

	Tahun		
	2021	2022	2023
Pendidikan	127.507.762	127.125.474	131.831.620
Pelatihan	18.549.819	27.590.228	29.840.345
Tidak Terampil	120.154.539	121.824.330	125.409.280

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) (Data Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya meskipun jumlah tenaga kerja terampil meningkat dari tahun ke tahun, angka tenaga kerja tidak terampil tetap mendominasi struktur pasar tenaga kerja nasional. Data tenaga kerja Indonesia tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika penting dalam struktur pasar kerja nasional. Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan tercatat sebesar 127,51 juta orang pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 127,13 juta orang pada 2022, namun meningkat signifikan menjadi 131,83 juta orang pada 2023. Sementara itu, jumlah tenaga kerja berdasarkan pelatihan mengalami kenaikan tajam, dari 18,55 juta pada 2021 menjadi 27,59 juta pada 2022, lalu mencapai 29,84 juta pada 2023. Di sisi lain, tenaga kerja tidak terampil tetap mendominasi, dengan jumlah 120,15 juta pada 2021, naik menjadi 121,82 juta pada 2022, dan 125,41 juta pada 2023. Ketidakseimbangan ini mencerminkan adanya mismatch antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil dengan realitas ketersediaan tenaga kerja yang ada. Becker (1993) dalam teorinya tentang human capital menyatakan bahwa keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan akan menambah produktivitas individu dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain ketimpangan dalam komposisi, distribusi tenaga kerja terampil secara spasial juga menunjukkan disparitas yang mengkhawatirkan. Data yang disusun berdasarkan pembagian wilayah per pulau pada periode 2021–2023 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa mendominasi jumlah tenaga kerja terampil secara nasional, sementara pulau-pulau seperti Maluku dan Papua tertinggal jauh dalam penyediaan tenaga kerja berkualitas

Tabel 1.5 Data Tenaga Kerja Terampil di Indonesia (Jiwa)

Pulau	Pendidikan			Pelatihan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera	2.951.122	2.913.287	3.070.591	444.419	589.140	629.045
Jawa	11.776.887	11.759.661	12.037.674	1.515.289	2.491.922	2.716.451
Kalimantan	1.486.842	1.519.630	1.562.374	302.811	403.123	425.476
Sulawesi	1.553.806	1.560.714	1.623.786	290.315	385.292	403.563
Bali dan Nusa Tenggara	2.404.643	2.363.209	2.571.182	415.182	605.508	659.242
Maluku	796.508	810.938	837.939	115.275	148.607	164.938
Papua	885.320	880.355	977.871	140.925	153.095	197.417

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) (Data Diolah)

Perkembangan jumlah tenaga kerja terampil di Indonesia pada tiga tahun terakhir memperlihatkan tren yang cukup menggembirakan, baik dari sisi pendidikan formal maupun pelatihan kerja. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan formal tercatat sebesar 127,51 juta orang. Angka ini sedikit menurun di tahun berikutnya menjadi 127,13 juta, namun kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 131,83 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang menyelesaikan pendidikan

formal.

Di sisi lain, tenaga kerja terampil yang diperoleh melalui jalur pelatihan juga mengalami pertumbuhan yang konsisten. Jumlahnya naik dari 18,55 juta pada tahun 2021 menjadi 27,59 juta di tahun 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 29,84 juta pada 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa program pelatihan kerja semakin mendapat perhatian sebagai salah satu strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja, khususnya dalam menjawab kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Secara keseluruhan, pada tahun 2023 terdapat sekitar 49,46 juta tenaga kerja terampil berdasarkan pendidikan dan sekitar 6,98 juta dari jalur pelatihan. Meskipun jumlah ini menunjukkan kemajuan, angka tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang dan menuntut keterampilan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis kompetensi perlu terus ditingkatkan agar ketersediaan tenaga kerja terampil di Indonesia dapat lebih optimal dan selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

Dominasi Pulau Jawa dalam jumlah tenaga kerja terampil menimbulkan kesenjangan regional yang nyata. Hal ini berpotensi memperkuat ketimpangan pembangunan antarwilayah karena daerah dengan sumber daya manusia yang lebih terampil memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas sektor-sektor utama, dan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Todaro dan Smith (2020) mengemukakan bahwa ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja terampil akan menyebabkan ketimpangan wilayah semakin melebar, karena daerah yang tidak mampu menyediakan SDM berkualitas akan tertinggal dalam integrasi pasar nasional dan global.

Dengan demikian, berdasarkan fakta data dan dukungan teori ekonomi mutakhir, terdapat celah teoritis yang belum banyak dieksplorasi secara empiris, khususnya terkait hubungan antara ketersediaan tenaga kerja terampil dan tidak terampil serta pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Sumatera. Studi ini tidak hanya bermaksud guna mengisi kekosongan kajian tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi kebaruan dalam bentuk pendekatan spasial terhadap distribusi tenaga kerja terampil, yang selama ini lebih banyak

dikaji dalam skala nasional atau sektoral. Penelitian ini harapannya mampu menyediakan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana disparitas keterampilan tenaga kerja antarprovinsi di Sumatera berkontribusi terhadap variasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan SDM yang lebih terarah dan adil antar wilayah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan analisis ketenagakerjaan, tenaga kerja tidak terampil merupakan komponen penting yang kerap kali menjadi indikator kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sukirno (2012) mendefinisikan tenaga kerja tidak terampil sebagai tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan formal atau pelatihan khusus, serta biasanya bekerja dalam sektor-sektor yang tidak memerlukan keahlian teknis. Jenis pekerjaan yang dijalani oleh tenaga kerja tidak terampil umumnya bersifat manual, berulang, dan berintensitas fisik tinggi, seperti buruh kasar, petugas kebersihan, atau pekerja angkut.

Senada dengan itu, Mankiw (2008) menjelaskan bahwasanya tenaga kerja tidak terampil adalah pekerja yang bekerja dengan syarat masuk (*entry requirement*) yang rendah, bahkan hampir tanpa pelatihan. Mankiw mencatat bahwa pekerjaan unskilled labor seringkali mudah digantikan oleh teknologi atau otomasi, sehingga masa depannya lebih tidak pasti jika tidak dibarengi dengan peningkatan keterampilan. Dalam sistem ekonomi modern yang semakin menekankan efisiensi dan teknologi, posisi tenaga kerja tidak terampil semakin termarginalkan, karena produktivitasnya cenderung stagnan dan tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan.

Kehadiran tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar tentu memiliki konsekuensi terhadap dinamika pembangunan daerah. Daerah seperti Provinsi yang berada di pulau Sumatera yakni sebagian besar sektor ekonominya masih berbasis pertanian, perkebunan, dan ekstraktif, cenderung memiliki komposisi tenaga kerja yang didominasi oleh kelompok tidak terampil. Hal tersebut adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan

keterampilan melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal perlu dikembangkan, agar terjadi transformasi struktural dalam ketenagakerjaan.

Dalam situasi global saat ini, ketika pasar tenaga kerja menjadi semakin kompetitif dan teknologi menggantikan banyak peran manusia, tenaga kerja tidak terampil menjadi kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, dalam setiap strategi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja harus menjadi fokus utama, agar tidak terjadi stagnasi produktivitas serta meningkatnya ketimpangan ekonomi antara kelompok pekerja.

Tabel 1.6 Data Tenaga Kerja Tidak Terampil di Indonesia (Jiwa)

Pulau Perprovinsi	Tahun			
	2021	2022	2023	Rata rata
Sumatera	2.458.985	2.475.461	2.459.165	2.464.537
Jawa	11.935.446	12.235.026	12.738.411	12.302.961
Kalimantan	1.439.229	1.383.136	1.450.945	1.424.437
Sulawesi	1.320.563	1.278.741	1.315.918	1.305.074
Bali dan Nusa Tenggara	2.099.922	2.099.126	2.111.271	2.103.440
Maluku	534.151	542.171	568.122	548.148
Papua	732.211	844.859	883.434	820.168
rata rata	2.931.501	2.979.789	3.075.324	2.995.538

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) (Data Diolah)

Analisis terhadap data rata-rata jumlah tenaga kerja tidak terampil per provinsi selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa permasalahan ketidakseimbangan kualitas tenaga kerja terjadi secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa, meskipun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan infrastruktur dan akses pendidikan yang relatif lebih baik, tetap mencatat jumlah tenaga kerja tidak terampil tertinggi, yaitu sekitar 12,3 juta per provinsi. Bila angka ini dikalikan dengan jumlah provinsi di Jawa, totalnya mencapai lebih dari 73 juta orang per tahun. Hal serupa terjadi di Sumatera dengan total sekitar 24 juta tenaga kerja tidak terampil, Kalimantan sekitar 7 juta, dan Sulawesi lebih dari 7,8 juta.

Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak terampil masih mendominasi struktur pasar kerja nasional, bahkan di wilayah yang tergolong lebih maju. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja belum merata dan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan industri pada tenaga kerja yang mempunyai keterampilan khusus. Keberadaan tenaga kerja tidak terampil yang besar berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi, karena rendahnya produktivitas dan keterbatasan kontribusi terhadap sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, data ini menjadi landasan penting untuk menunjukkan urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Mankiw (2021), perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan di antara tenaga kerja sangat berdampak pada output ekonomi karena individu dengan keterampilan rendah cenderung bekerja di sektor yang menghasilkan nilai tambah lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa kuantitas tenaga kerja semata tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan juga kualitas dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan.

Dengan demikian, teori klasik yang hanya melihat tenaga kerja sebagai faktor produksi fisik (*labor as input*) sudah tidak lagi memadai. Teori modal manusia (*human capital theory*) seperti dikembangkan oleh Becker (1993) dan didukung oleh Lucas (1988) menggaris bawahi pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan sebagai sarana membentuk tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Pada konteks ini, tenaga kerja terampil berperan lebih besar pada pertumbuhan ekonomi daripada tenaga kerja tidak terampil.

Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis perbandingan ketersediaan tenaga kerja terampil dan tidak terampil antarprovinsi di Pulau Sumatera, serta bagaimana kedua jenis tenaga kerja tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah secara diferensial. Selama ini studi-studi terdahulu lebih banyak membahas pengaruh tenaga kerja secara

agregat terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa membedakan kualitasnya secara rinci.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis kuantitatif yang membedakan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil berdasarkan wilayah, khususnya di provinsi-provinsi di Sumatera. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan spasial yang mengaitkan ketimpangan keterampilan tenaga kerja dengan variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi. Dengan menggunakan data panel dan teknik analisis ekonomi regional, harapannya hasil studi ini dapat berkontribusi signifikan dalam formulasi kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian akan mengkaji permasalahan yang mencakup hal-hal berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Tenaga Kerja Terampil dan Tenaga Kerja tidak Terampil Per Provinsi Di Pulau Sumatera dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera?
2. Bagaimana Pengaruh Tenaga Kerja Terampil dan Tenaga Kerja tidak Terampil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi di Pulau Sumatera Pada Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, alhasil tujuan penelitian yang ingin diraih pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perkembangan Tenaga Kerja Terampil dan Tenaga Kerja tidak Terampil di Provinsi Pada Pulau Sumatera dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Tenaga Kerja Terampil dan Tenaga Kerja tidak Terampil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Pada Tahun 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini harapannya mampu memperkaya pemahaman mengenai ketersediaan tenaga kerja terampil di setiap provinsi di Pulau Sumatera serta berkontribusi dalam menyediakan informasi yang relevan. Selain itu, temuan dari penelitian ini harapannya menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan ketika merumuskan solusi untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Pulau Sumatera.